

# TRANSFORMASI PENENUN BUGIS-WAJO MENUJU ERA MODERNITAS

Muhammad Syukur<sup>1</sup>, Arya Hadi Dharmawan<sup>2</sup>, Satyawan Sunito<sup>2</sup>, Didin S Damanhuri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Makassar,  
[muhsyukur\\_sosiologi\\_unm@yahoo.co.id](mailto:muhsyukur_sosiologi_unm@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Program Studi Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor,

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen Institut Pertanian Bogor

---

## ABSTRACT

*This study aims to reveal the transformation process of weaving activity of Wajo people in South Sulawesi. This study uses a constructivist paradigm with a qualitative approach. Data was collected through in depth interviews, observation, documentation, and historical sociology. The analysis data uses data reduction, data presentation, and taking conclusion. The results shows that the weaving activities of Wajo people in design patterns and developing the loom stuffs by cultural fusion from outside of Bugis community and local elements of creativity and local intelligence communities of Wajo. The transformation process began with the use of a loom gedogan in the 13<sup>th</sup> century, then loom machines in 1950, and the use of looms machine in 2004. Pattern Transformation is begun from plain pattern (1400-1600), squares pattern/palekat (1600-1900), and the pictorial pattern (1900-now).*

*Keywords: Transformation, Weaver, Bugis-Wajo*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan mengungkapkan proses transformasi kegiatan tenun rakyat di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi sosiologi sejarah. Analisis data menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertenunan rakyat di Kabupaten Wajo dalam menunjukkan adanya perpaduan kebudayaan dari luar komunitas Bugis dan unsur kreatifitas dan kecerdasan lokal masyarakat Wajo. Transformasi alat tenun bermula pada penggunaan alat tenun gedogan pada abad ke-13, kemudian Alat Tenun Bukan Mesin pada tahun 1950, dan penggunaan Alat Tenun Mesin tahun 2004. Transformasi corak bermula dari corak tidak bergambar (tahun 1400-1600), corak kotak-kotak/palekat (1600-1900), dan corak bergambar (1900-sekarang).*

Kata Kunci: Transformasi, Penenun, Bugis-Wajo

---

## PENDAHULUAN

Para ahli sejarah memperkirakan bahwa kebudayaan menenun awalnya dikenal pada kurang lebih 5000 SM di daerah Mesopotamia dan Mesir yang kemudian tersebar ke daerah Eropa dan Asia termasuk di Indonesia. Menurut Pelras (2006) keterampilan menenun adalah keterampilan lokal yang dimiliki oleh nenek moyang berbagai etnis di

Nusantara termasuk etnis Bugis-Makassar yang kemudian diperkaya dengan adanya interaksi antara India, dan Cina. Keterampilan menenun adalah semacam *local genius* yang dimiliki oleh etnis Bugis (Nawawi dan Gustami, 2002).

Geldem (Kahdar, 2009) mengemukakan bahwa kebudayaan menenun bagi masyarakat Bugis sudah

dijalankan sejak abad ke-13. Fenomena tersebut dibuktikan dengan adanya artefak bahan pakaian yang terbuat dari kulit kayu yang ditemukan pada sekitar abad ke-13 di wilayah Bugis. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Pelras (2006) yang menemukan bahwa keterampilan bertenun merupakan salah satu sumber penghasilan orang Bugis pada masa kerajaan.

Persistensi (ketahanan) menghadapi berbagai periode waktu dalam kegiatan para penenun Wajo tidak bisa dilepaskan dari keterlekatan tindakan penenun pada kontur budaya yang membentuknya. Orang Bugis-Wajo memiliki sistem budaya yang telah melekat (*embedded*) dan membentuk kepribadian dalam menghadapi tantangan hidup. Kemampuan adaptasi merupakan aspek penting yang menopang persistensi mereka sehingga dapat *moving out of poverty*, baik sebagai individu maupun sebagai kolektif (Lewis, 1988). Kontur budaya ini terbukti memberikan kontribusi terhadap kemampuan mereka bertahan dalam rentang waktu yang begitu lama. Hal ini juga memberikan kemampuan untuk dapat mencari alternatif pekerjaan lain ketika mata pencaharian utama sebagai petani atau nelayan tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup. Salah satu alternatif yang memungkinkan adalah kegiatan menenun. Menenun merupakan salah satu kegiatan penting bagi masyarakat Bugis-Wajo yang bisa berperan sebagai katub pengaman bagi sebagian penenun gedogan sedangkan kalangan pengusaha tenun bisa berperan sebagai bentuk usaha untuk mengakumulasi modal. Kegiatan tenun umumnya dilakukan oleh kaum perempuan dalam rangka membantu suami mencari nafkah (Chabot, 1996)

Data statistik Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa terdapat sekitar 5.113 orang penenun gedogan dengan

jumlah produksi sekitar 99.640 sarung per tahun. Adapun penenun yang menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) berjumlah 227 orang dengan jumlah ATBM sebanyak 1.914 dan kapasitas produksi sekitar 1.589.000 meter kain pertahun, serta hanya satu orang pengusaha yang menggunakan Alat Tenun Mesin (ATM). Khusus untuk pemintal benang sebanyak 91 orang, sedangkan 301 kepala keluarga bergerak dibidang penanaman murbey dan pemeliharaan ulat sutera dengan produksi 4.250 kilogram benang pertahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2012).

Penetrasi sistem ekonomi global kedalam kegiatan pertenenan di Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Wajo merubah tatanam kehidupan sosial ekonomi dalam komunitas penenun. Fenomena ini bermula ketika terjadi kontak dagang antara orang Bugis dan pedagang dari berbagai negara di dunia. Kondisi ini berlanjut sampai masa pendudukan kolonial Belanda dan Jepang di Sulawesi Selatan serta berlanjut sampai awal kemerdekaan bahkan sampai pada saat sekarang ini. Adopsi corak dan warna serta penggunaan alat tenun semi modern dan modern terjadi dalam kegiatan pertenenan rakyat di Kabupaten Wajo. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih jauh terkait proses transformasi yang terjadi dalam kegiatan pertenenan pada masyarakat penenun di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses transformasi kegiatan pertenenan mulai dari zaman kerajaan sampai pada masa kini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses transformasi corak kain tenun dan peralatan tenun yang digunakan oleh penenun di

Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo sebagai pusat pengembangan kegiatan pertenunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran penelitian adalah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha tenun yang bermukim di lokasi penelitian pada saat penelitian ini dilaksanakan, baik penenun gedogan, penenun ATBM skala rumah tangga, maupun pengusaha tenun. Penentuan responden dilakukan secara *purposive*.

Paradigma penelitian yang digunakan adalah konstuktivis (Guba dan Lincoln, 2000: 109). Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu; proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994; Moleong, 1999).

Mengingat gejala transformasi penenun Bugis-Wajo memasuki era modern adalah gejala yang mengandung dimensi struktural (sosiologis) dan prosesusal (historis) sekaligus, agar kedua dimensi bisa dipahami maka digunakan pendekatan sosiologi sejarah terkait mengapa terjadi sesuatu (konteks sosial kejadian) dan sejarah sosiologis terkait bagaimana terjadi sesuatu atau konteks urutan kejadian (Kartodirdjo, 1992). Proses analisis konteks sosial terjadinya sebuah peristiwa dan urutan kejadian peristiwa oleh Gootschalk (1985: 32) disebut sebagai proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transformasi Penenun Bugis-Wajo dari Masa Kerajaan Sampai Kolonial**

Kerajaan Wajo berdiri sejak tahun 1436. Kegiatan menenun di Wajo diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 atau hampir dengan terbentuknya Kerajaan Wajo. Tenun mulai berkembang pada abad ke-15 pada saat Islam masuk di Sulawesi Selatan. Orang Wajo pada awalnya menenun untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan keluarga. Kain sarung dibuat untuk dipakai sehari-hari, kemudian menghadiri upacara adat, misalnya perkawinan dan kenduri. Para penenun menjalankan aktivitasnya di rumah. Di antara hasil tenun tersebut, terdapat juga untuk kebutuhan pelayaran, misalnya kain layar perahu (Kartiwa, 2007). Bahan tenun awalnya diperoleh dari serat batang pisang dan serat nenas. Kemudian mereka mengenal kapas yang dipilin sendiri. Sementara benang sutera baru dikenal di Nusantara pada sekitar abad ke-15 - 16, ketika pedagang-pedagang dari luar membawa benang sutera.

Menelusuri jejak sejarah pertenunan Wajo, maka Tosora merupakan ruang yang tidak dapat diabaikan. Diyakini oleh orang Wajo bahwa pertenunan di Wajo sebagaimana yang ada sekarang ini bermula dari Tosora, kemudian menyebar ke berbagai tempat di Wajo. Hal ini berdasarkan sejarah bahwa Tosora merupakan Ibukota Kerajaan Wajo pada masa lalu sehingga aktivitas ekonomi berpusat di Tosora (Lembaran Berita Sejarah Lisan. Nomor 9 Maret 1982).

Kegiatan menenun sebagai produk kebudayaan pada masa awal kemunculannya diperuntukkan bagi kepentingan upacara adat dan kerajaan, karena itu adalah rasional jika dikatakan

Tosora merupakan pusat pertenunan pertama di Wajo. Fenomena tersebut sejalan temuan Maxwell (2003) bahwa kain tenun Asia adalah salah satu bentuk seni yang paling kuat dan menarik. Kain tenun memainkan peran penting dalam kehidupan praktis upacara adat dan agama dari rakyat Asia selama berabad-abad. Tenun sebagai kegiatan ekonomi yang mendatangkan keuntungan baru muncul kemudian ketika permintaan pasar akan produk kain tenun mulai masuk ke Wajo. Gejala tersebut mirip temuan Yukimatsu *et.al*, (2008) pada kain tenun *Thai-Lao Matmii* di Thailand dan kain tenun *Tumugi Kasuri* di Jepang. Masyarakat di kedua negara tersebut awalnya memproduksi kain tenun untuk keperluan upacara adat sedangkan aspek ekonomi muncul kemudian ketika kain semakin diminati oleh masyarakat luas.

Sengkang yang juga bagian penting dalam pembahasan ini adalah Ibukota Kabupaten Wajo sekarang ini. Dalam sejarah Kerajaan Wajo, setelah penghancuran Tosora oleh pasukan Kerajaan Bone, kemudian Ibukota Kerajaan Wajo dipindahkan ke Sengkang (Lembaran Berita Sejarah Lisan. Nomor 11 Maret 1985). Oleh karena itu, menelaah Tosora dan Sengkang dalam konteks penelitian ini penting dalam rangka memahami perkembangan pertenunan Wajo. Perpindahan Ibukota Kerajaan Wajo di masa lalu diikuti dengan perpindahan pusat kegiatan ekonomi, termasuk pertenunan. Kota Sengkang kemudian berkembang kegiatan pertenunan dan menjadi pusat usaha industri/perdagangan sutera sampai sekarang ini. Sementara di Tosora masih mempertahankan tradisi tenun gedogan. Pengembangan kegiatan persuteraan di Wajo saat ini berpusat di Desa Pakkana Kecamatan Tanasitolo

yang berjarak sekitar  $\pm 10$  KM dari Sengkang (Ibukota Kabupaten Wajo)

Kegiatan menenun pada abad ke-14 dan ke-15 bermula dengan teknik tenun pakan dan lungsi. Sitem menenun ikat pakan masuk ke Indonesia bersamaan ketika mulai dikenal benang sutera dalam kegiatan perdagangan sekitar abad ke-15 dan ke-16. Benang sutera pada awalnya merupakan barang yang diimpor dari Cina, India dan Siam. Dalam kontak dagang inilah benang dan kain sutera mulai dikenal di Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Wajo. Sejalan dengan itu, suku Bugis juga senantiasa terlibat dalam pengembaraan nilai budaya dengan menjadi pelaut-pelaut ulung. Masyarakat Bugis menyerap budaya dari luar dan selanjutnya dikembangkan pada masyarakat Bugis.

Faktor lain menunjang meluasnya penggunaan tenun oleh masyarakat Bugis-Wajo adalah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 karena sejak itu Makassar mulai berperan penting sebagai bandar transit di kawasan Indonesia Timur yang ramai dikunjungi bangsa-bangsa lain. Sumber lain, mengatakan bahwa benang sutera impor dibawa masuk ke Indonesia oleh pedagang Islam yang berasal dari India dan Arab, melalui Sumatra, Jawa, serta daerah-daerah pantai yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari luar negeri. Sejak masa inilah diperkirakan benang sutera sudah meluas digunakan dalam kegiatan tenun di Sulawesi Selatan (Kahdar: 2009).

Kegiatan monopoli perdagangan kain di Sulawesi Selatan terjadi ketika diadakannya perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 antara pihak Kerajaan Gowa-Makassar dan pihak Belanda. Salah satu butir isi perjanjian Bongaya tersebut disebutkan bahwa seluruh orang Portugis dan Inggris harus diusir dari wilayah Makassar dan tidak

boleh bertempat tinggal di sini atau melakukan perdagangan. Tidak ada orang Eropa (kecuali Belanda) yang boleh masuk berdagang di Makassar. Orang India atau Moor (muslim India), Jawa, Melayu, Aceh, Siam, tidak boleh memasarkan kain dan barang-barang dari Koromandel, Persia, dan Bengal, atau barang-barang dari Cina, karena hanya kompeni yang boleh melakukannya. Rakyat Makassar dan Bugis tidak boleh berlayar, kecuali ke Bali, Pantai Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor, dan Kalimantan dan harus meminta izin dari komandan Belanda di Makassar (Andaya, 2004: 387-388). Masa ini merupakan masa suram dalam kegiatan perdagangan kain tenun Bugis ke berbagai wilayah di Nusantara, karena adanya pembatasan kegiatan pelayaran yang ditetapkan dalam perjanjian Bongaya tersebut.

Monopoli perdagangan kain yang sebelumnya diimpor perlahan mengalami penurunan pada tahun 1780. Perdagangan ini digantikan oleh pedagang Indonesia, termasuk pedagang Bugis yang memperdagangkan kain tenun dari daerah Bugis dan sekitarnya dengan corak kain kotak-kotak Bugis. Para pedagang ini tidak mudah diatur oleh Belanda karena kecepatan armada kapal dan persenjataan yang dimiliki, mereka mampu menghindari kejaran dari kapal Belanda sehingga pedagang Bugis mampu memenuhi sebagian keperluan kain masyarakat di kepulauan nusantara. Menurut Laarchoven bahwa hal inilah yang membuat monopoli Belanda terputus atas kain impor (Kahdar: 2009).

Menurut catatan Conte tahun 1540-an bahwa sumber penting dari kain sutera adalah Sulawesi Selatan, khususnya Bugis-Wajo. Pengolahan sutera ini melahirkan sarung Bugis yang berwarna-warni (Reid, 2011: 106). Apa yang dicatat oleh Conte nampaknya

memperlihatkan perspektif istana kerajaan Wajo yang menggunakan sarung adat yang terbuat dari sutera dan berwarna-warni. Keberadaan kain sutera pada awalnya diperuntukkan ornamen istana dan keluarga kerajaan.

Pada abad ke-15 sampai abad ke-17 tekstil impor masuk ke Indonesia dari India dan Cina, namun terdapat juga perdagangan tekstil yang diproduksi di Nusantara sendiri, terutama di Sulawesi Selatan (Ricklefs, 1981). Kontak dagang antara Cina dan kerajaan Wajo terutama dalam abad ke-17-18 Masehi. Fenomena tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah makam saudagar Cina di daerah Wajo. Makam tersebut memunculkan penafsiran bahwa hubungan dagang dengan Cina di masa lampau telah tercipta, sehingga sebagian penduduk Wajo meyakini bahwa keterampilan bertenun banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Cina terutama dalam hal penggunaan benang sutera sebagai bahan baku pembuatannya.

Sejak tahun 1905 daerah Wajo menjadi daerah kekuasaan langsung Belanda. Memasuki periode pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tradisi bertenun pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Pada tahun 1920-an, kegiatan menenun di Wajo mengalami kemajuan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Tahun 1920-an industri tenun tradisional telah berkembang di daerah Sulawesi Selatan. Pejabat pemerintah kolonial dari bagian tekstil dari Departemen Pertanian, Tenaga Kerja, dan Perdagangan, mengadakan perjalanan dinas ke Sengkang dan Parepare. Kunjungan ini adalah tindak lanjut dari kunjungan dua tahun sebelumnya oleh Dalenoord diikuti oleh Burliegh ke Sengkang dan Parepare sebagai pejabat yang diutus untuk mengembangkan industri tekstil (*Nieuwe*

*Rotterdamse Courant*, tanggal 5 November 1929). Kunjungan pemerintah ini bermaksud untuk memajukan industri tekstil pribumi, baik dari segi metode kerja, bahan-bahan mentahnya dan memperkenalkan alat tenun semi-modern kepada penduduk yang masih menggunakan alat tenun tradisional. Kegiatan bertenen di Wajo tidak dikembangkan lebih jauh oleh pemerintah kolonial Belanda karena kelangkaan tenaga kerja. Pemerintah lebih memilih mengembangkan pertenenan di wilayah Majalaya - Jawa Barat dan Balige - Sumatera Utara (Oki, 1977).

Palmer dan Castles (Sitorus, 1999) mengemukakan bahwa, sejak tahun 1929 sampai awal 1930-an, terjadi depresi besar perekonomian dunia telah memukul sektor pertanian/perkebunan di Hindia Belanda sehingga tenaga kerja di sektor itu terpaksa harus dicitkan dan sebagai akibatnya tingkat pengangguran melonjak drastis. Dampak langsung kesulitan ekonomi tersebut adalah kemerosotan tingkat pendapatan sehingga penduduk mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebagai jalan keluar, maka pemerintah kolonial kemudian mendorong perkembangan industri tenun lokal skala kecil. Dorongan tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan yang menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan industri tenun sekaligus disertai dengan penyebarluasan teknologi Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Menurut Sitorus (1999) tahun 1930 merupakan tonggak awal terjadinya ledakan industri tenun dan sekaligus revolusi teknologi tenun dari alat tenun gedogan ke Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Kebijakan pemerintah kolonial Belanda ini tidak memberikan dampak bagi penenun di Wajo, karena kebijakan tersebut diarahkan ke wilayah Sumatera dan Jawa.

Setelah pemerintahan Hindia Belanda berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Jepang, industri tenun tradisional Wajo mengalami penurunan drastis karena kelangkaan bahan baku. Sebagian besar penenun menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu sehingga terjadi krisis pakaian pada periode pemerintahan Jepang. Untuk mengatasi krisis pakaian tersebut, para menenun menggunakan serat pisang untuk ditenun menjadi kain. Salah seorang pengusaha sutera di Sengkang menuturkan bahwa usaha keluarganya mengalami kehancuran pada periode pemerintahan Jepang sehingga orang tuanya menggunakan serat pisang, dan beberapa kali mengambil kaus kaki para tentara Jepang yang rusak dan dibuang, lalu memintalnya kembali untuk dijadikan pakaian.

Masa pendudukan Jepang (1942 - 1945) dan masa revolusi (1945 - 1950), kegiatan tenun di Wajo mengalami masa sulit. Masa perang Dunia II dan perang revolusi kemerdekaan waktu itu menyebabkan terganggunya lalu lintas perdagangan antara Asia (termasuk Indonesia) dan Eropa serta Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan pasokan benang sutera sebagai bahan baku pembuatan kain tenun menjadi terganggu. Terjadi kelangkaan benang sutera di pasar sehingga penenun di Wajo banyak yang menghentikan usahanya. Pada masa pemerintahan Jepang, Wajo juga mengalami penguasaan yang sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Pada periode pendudukan Jepang kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam digunakan untuk mendukung kegiatan perang. Jepang memprioritaskan pada ekonomi pertanian padi. Pertanian padi menjadi amat penting bagi Jepang, karena persediaan beras bagi tentara militernya

mengalami kekuarangan akibat perang dengan sekutu. Untuk menanggulangi kekurangan beras, maka Jepang mulai mengambil kebijakan untuk menggenjot produksi padi. Kebijakan tersebut mengganggu penyediaan benang untuk kegiatan pertenunan. Petani murbey dan ulat sutera yang bergerak dalam bidang penyediaan bahan baku tidak dapat memenuhi permintaan benang. Lahan yang biasa digunakan untuk menanam murbey diganti tanaman padi. Sementara tanaman kapas yang dikembangkan di Selayar harus diganti dengan tanaman jarak dan padi.

Pemerintah Jepang kemudian menyadari pentingnya pakaian yang langkah di pasaran sehingga memerintahkan masyarakat untuk menanam kembali kapas. Jepang berusaha mengembangkan produksi kapas lokal untuk menunjang kegiatan pertenunan, namun usaha tersebut tidak berjalan dengan baik karena kebutuhan beras jauh lebih diprioritaskan. Pengembangan tanaman kapas di Wilayah Sulawesi Selatan dilaksanakan di Kabupaten Selayar dan Tanah Toraja. Hasil produksi tanaman kapas dari kedua daerah tersebut berupa benang kapas banyak dipasarkan di daerah Wajo untuk kalangan penenun. Menjelang akhir masa pendudukan Jepang, penduduk Sulawesi Selatan termasuk di Wajo mencoba mengatasi krisis bahan baku dengan menanam kapas di halaman rumah. Gejala ini bukanlah fenomena baru, sebab penenun di Sulawesi Selatan sebelumnya sudah mampu memproses kapas menjadi benang terutama di daerah sekitar Selayar dan Tanah Toraja. Pengetahuan tersebut kemudian diadopsi oleh orang Wajo ketika mereka menghadapi kesulitan terutama pada masa krisis politik dan krisis bahan baku.

### **Transformasi Penenun Bugis-Wajo Masa Kemerdekaan – Sekarang**

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, negara yang baru lahir itu pun mengalami masa kekacauan yang baru. Masa ini ditandai dengan krisis politik dan ekonomi yang tidak menentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah terbentuk dihadapkan pada krisis politik yang ditandai dengan beberapa pemberontakan daerah seperti DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Kondisi ini menyebabkan kegiatan menenun di Wajo mengalami kelesuan, karena terputusnya hubungan dengan berbagai wilayah. Pasokan bahan baku menjadi terganggu, demikian pula pemasaran kain tenun.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950, muncul ruang baru bagi penenun Wajo. Hubungan ekonomi dengan Jawa kembali terjalin. Pada periode ini penenun Wajo mulai mengadopsi teknologi Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dari Jawa. Industri tekstil Wajo kembali memperlihatkan gairahnya. Teknologi baru adalah upaya menjawab kebutuhan pakaian di wilayah Indonesia Timur, terutama, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Kalimantan yang merupakan pasar bagi penenun Wajo sejak periode kolonial.

Setelah ATBM mulai digunakan di Wajo dan gairah pertenunan menemukan momentum untuk bangkit, justru keadaan tersebut tidak bertahan lama karena situasi keamanan regional di Sulawesi Selatan terguncang oleh gerakan DI/TII dan Permesta sehingga sektor pemasaran mengalami kendala. Pemasaran produk tenun mengalami

hambatan ketika pecah gerakan DI/TII tahun 1952 dan PRRI/Permesta pada tahun 1957, produksi terpaksa melambat bahkan sebagian besar berhenti selama dua tahun. Ketika pecah pemberontakan, aktivitas ekonomi rakyat nyaris lumpuh, petani tidak dapat bercocok tanam karena mereka harus mengungsi ke tempat yang aman. Penenun dan keluarganya banyak yang melakukan migrasi. Sebagian penenun yang bermigrasi memilih menetap di Makassar dan menjadi pedagang kain. Pasar-pasar yang ada di Makassar seperti; Pasar Sentral, Butung, dan Pasar Terong menjadi tempat orang-orang Wajo menjual bahan pakaian. Sebagian migran dari Wajo menuju ke daerah seperti Donggala dan Samarinda. Ditemukan teknik tenun di kedua daerah tersebut menggunakan teknik orang Wajo dan beberapa jenis corak kain yang dihasilkan mirip dengan corak yang dihasilkan orang Wajo (Idris, dkk, 2009).

Penenun Wajo kembali mengalami kendala tahun 1980-an ketika terjadi kelangkaan bahan baku, sementara pemerintah pusat lebih memprioritaskan industri tekstil yang berkala besar. Para penenun tradisional dan pengusaha sutera kehilangan bahan baku di pasaran. Perkembangan bidang pertanian bernilai ekspor mengakibatkan para petani murbey mulai beralih ke tanaman bernilai ekspor seperti kakao sehingga bahan baku sutera menjadi langka. Sementara untuk mengimpor bahan baku, para penenun harus mengeluarkan biaya lebih besar sehingga produksi semakin menurun. Kebijakan pemerintah yang mementingkan impor bahan baku benang pada tahun 1980-an menjadikan sektor pertenunan di Wajo kehilangan bahan baku. Benang impor tak terbeli oleh penenun karena harganya melambung tinggi. Di sisi lain daya beli

masyarakat penenun menurun karena kurangnya produksi yang mereka hasilkan.

Memasuki tahun 1997 ketika terjadi krisis ekonomi yang menghantam Asia Tenggara merupakan puncak krisis yang dihadapi para penenun di Wajo. Kegiatan menenun di Wajo pada masa ini nyaris lumpuh total karena kehilangan bahan baku. Pada masa lalu ketika terjadi kelangkaan bahan baku di pasaran, para penenun masih bisa berharap dari benang lokal yang diproduksi petani di Wajo dan sekitarnya. Akan tetapi setelah krisis ekonomi 1997 kelangkaan bahan baku tidak dapat diatasi. Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, industri pertenunan mengalami kemandekan. Sebagian besar usaha pertenunan tutup karena kelangkaan bahan baku dan melambungnya kebutuhan pokok. Upaya menutupi kelangkaan bahan baku, maka pemerintah mengembangkan perkebunan murbey di Kabupaten Enrekang, Soppeng, Sidrap dan Wajo yang merupakan sentra produksi bahan baku. Akan tetapi upaya yang dilakukan pemerintah belum menjawab persoalan kelangkaan bahan baku yang dihadapi penenun. Meskipun sulit, kegiatan menenun di Wajo tidak pernah punah. Para penenun bertekad melanggengkan warisan leluhur mereka. Beberapa penenun memilih merantau untuk mencari pekerjaan ditempat lain seperti yang dialami Ridwan. Pak Ridwan merantau ke Sulawesi Tenggara dan membuka perkebunan kakao. Namun karena usaha kebunnya gagal dan setelah keadaan membaik barulah kemudian ia kembali menggeluti kegiatan tenun. Rantau menjadi salah satu alternatif dari krisis ekonomi tahun 1997 kendatipun sebagian besar dari mereka pada akhirnya kembali ke kampung halaman bertenen.



Pengalaman berbeda dialami oleh Kurnia Syam ketika terjadi krisis ekonomi. Sebagai pengusaha sutera yang diwariskan keluarga secara turun temurun, Kurnia Syam merespon krisis ekonomi dengan melakukan penghematan. Untuk menemukan celah dari krisis ekonomi, Kurnia Syam mendatangkan pekerja dari Jawa untuk menciptakan tenun batik. Konteks ini memperlihatkan terjadinya diversifikasi produk dari sarung sutera menjadi kain sutera batik untuk bahan pakaian, tas, dan lain sebagainya. Demikian pula beragam variasi motif bermunculan untuk menarik selera pasar. Pengelolaan organisasi usaha ke arah yang lebih profesional (masih melibatkan manajemen keluarga) namun telah menetapkan standar kerja yang profesional.

Persaingan yang tidak sehat di antara pengusaha sutera sering mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan harga sehingga memicu hubungan yang kurang harmonis di antara pengusaha sutera. Muncul upaya monopoli bahan baku dan produk tenun dari pengusaha yang lebih besar sehingga beberapa pengusaha kecil harus jatuh bangun mempertahankan usahanya. Para spekulasi membuat harga produk tenun tidak stabil. Kondisi ini diperparah ketika pemerintah daerah tidak melakukan kontrol terhadap harga sutera. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka dibentuklah asosiasi sutera di Sulawesi Selatan yang bernama SIC (*Silk Solution Centre*). Asosiasi ini diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan, mengatur etika pemasaran kain tenun dan meningkatkan segala aspek yang berkaitan dengan persuteraan. Salah satu sasaran dari asosiasi persuteraan adalah mengembangkan usaha persuteraan dari hulu ke hilir. Industri hulu meliputi kegiatan mulai dari

produksi telur untuk sutera sampai kokon pintal dan kokon akhir. Para pelaku industri hulu ini adalah para petani sutera, perusahaan swasta, pemerintah melalui Perhutani. Kemudian industri hilir meliputi kegiatan pertenunan dan industri kerajinan sutera. Namun disayangkan karena organisasi SIC ini tidak melibatkan penenun tradisional (gedogan).

Upaya pengembangan persuteraan alam di daerah ini, khususnya dalam memberikan bantuan dan bimbingan teknis pada masyarakat, pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 097/Kpts-II/1984 tgl 12 Mei 1984 membentuk Balai Persuteraan Alam. Penanganan pembinaan persuteraan alam pada masyarakat di Sulawesi Selatan, sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dengan didirikannya Stasiun Persuteraan Alam (SPA) pada tahun 1970, di Tajuncu Kabupaten Soppeng sebagai pusat pengembangan sutera pada waktu itu. Pada tahap selanjutnya untuk lebih mendukung pengembangan persuteraan alam di Sulawesi Selatan, dibentuk Proyek Pembinaan Persuteraan Sulawesi Selatan. Pada tahun 1978 Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama teknis dibidang persuteraan alam dengan Pemerintah Jepang. Proyek kerjasama ini berakhir pada tahun 1985. Keberadaan proyek tersebut merupakan cikal bakal dari pembentukan Balai Persuteraan Alam. Tahun 1984 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 097/Kpts-II/1984 tanggal 12 Mei 1984 dibentuklah Balai Persuteraan Alam (BPA) Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1976, masyarakat Sulawesi Selatan melalui proyek BANPRES (Bantuan Presiden) mendapatkan 4 mesin pemintalan semi otomatis yang ditempatkan di Kabupaten Soppeng,

Wajo, Sidrap dan Enrekang. Mulai tahun 1975 - 1984, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang melalui proyek ATA-72 mengembangkan proyek persuteraan alam di Sulawesi Selatan. Sekarang ini produksi kokon dan benang sutera Sulawesi Selatan mengalami pasang surut tapi masih yang tertinggi di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah tersebut berkontribusi terhadap kelangsungan penenun di Wajo.

### Transformasi Corak Kain Tenun

Babak *Pertama*, dikategorikan corak tidak bergambar (perkiraan tahun 1400-1600), pada kurun waktu ini masyarakat baru mengembangkan tenunan dengan corak berupa garis-garis, baik vertikal (*mattetong*) maupun horizontal (*makkalu*) berkeliling bahkan masih banyak yang tidak bergambar/polos. Bahan baku yang digunakan adalah serat katun dengan menggunakan alat tenun *walida* (gedokan). Menurut kepercayaan masyarakat Bugis-Wajo bahwa kehidupan manusia senantiasa melibatkan hubungan antara manusia penciptanya dan hubungan antar sesama manusia (Fitria, 2011). Berdasarkan kepercayaan masyarakat Bugis-Wajo tersebut, maka corak kain tenun dihasilkan melambangkan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan (corak *mattetong*/vertikal) sedangkan corak *makkalu* atau horisontal melambangkan hubungan antar manusia. Konsepsi manusia Bugis-Wajo akan kehidupan yang baik dimana harus terjalin hubungan manusia dan Tuhan, dan hubungan sesama manusia menginspirasi penenun untuk membuat kain tenun yang bercorak vertikal dan horisontal.

Babak *Kedua*, dikenal dengan corak kotak-kotak/palekat (1600-1900)

masyarakat setempat sudah mulai mengenal tenun dengan lebih baik sehingga garis-garis horizontal dan vertikal dipadukan menjadi corak kotak-kotak, pada masa ini *lippa* sudah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik pada corak maupun bahan baku. Corak berkembang dengan dikenalnya benang emas dan perak hasil perniagaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Sumber inspirasi penciptaan corak kain tenun pada Kotak-kotak (1600-1900) bersumber dari dalam masyarakat dan pengaruh luar. Sumber inspirasi yang berasal dari dalam masyarakat yaitu adanya kepercayaan masyarakat Bugis-Wajo pada "*sulapa eppa*" (segi empat) sebagai sumber penghidupan yaitu; api, air, udara dan tanah. Bagi masyarakat Bugis, kehidupan bisa dijalani jika tersedia keempat unsur kehidupan yaitu api, air, udara dan tanah. Kepercayaan ini mengilhami terciptanya corak kotak-kotak sebagai pakaian tradisional masyarakat Bugis. Pengaruh dari luar yang juga mengilhami penciptaan corak kotak-kotak dengan aksent benang emas dan perak berasal dari pengaruh kebudayaan India dan Cina. Kontak dagang antara pelaut-pelaut Bugis dengan para pedagang yang berasal dari India dan Cina yang membawa benang emas dan perak, benang sutera, dan jenis kain pelekat membuat penenun Bugis mulai mengadopsi penggunaan benang emas dan perak serta penggunaan benang sutera dalam kegiatan pertenunan.

Sekitar tahun 1785, Forrest (Pelras, 2006; Kahdar: 2009; Andaya, 2004) mengemukakan bahwa penduduk Sulawesi sangat terampil menenun, umumnya mereka menenun kain kapas bergaya kambai yang mereka jual ke seluruh Nusantara. Kain-kain tersebut bermotif kotak-kotak merah bercampur biru. Kain tenunan Kambai di sini adalah sejenis kain kapas dengan motif

kotak-kotak yang mula-mula diimpor dari kota Cambay (Khambat) di pesisir Gujarat, India Barat. (Sahriah, 1993; 1992; Kahdar, 2009). Coraknya serupa dengan corak kain palekat, yang berasal dari kota Pulicat, di pesisir Koromandel (Coromandala), India Tenggara. Tenunan sutera dari India yang dibawa ke Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan dengan corak dan desain khusus yang disebut "*patola*" memberikan pengaruh terhadap perkembangan ragam hias tenun di Bugis, Makassar dan Toraja. Kain tenun semacam ini dikenal di daerah Bugis sebagai kain tenun *sarita* (Sahriah, 1993: 7).

Babak *Ketiga*, yaitu babak corak bergambar (1900 - Sekarang), berkembangnya teknologi alat tenun dari alat tenun gedogan menjadi Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sampai pada Alat Tenun Mesin (ATM). Gejala ini membuat perkembangan corak semakin dinamis. Paduan antara keterampilan yang tinggi dan teknologi yang memadai maka corakpun mulai bergambar bunga dan binatang. Selera pasar lebih merupakan pertimbangan dalam membuat corak dan warna kain tenun.

Hal lain yang menarik dari kain tenun Bugis Wajo adalah dalam hal pewarnaan kain. Pewarna kain tenun Bugis Wajo pada masa 1400-1900 menggunakan bahan-bahan alami non-kimia. Masyarakat setempat menggunakan zat pewarna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yaitu dari akar, batang pohon, kulit kayu, dan buah-buahan. Warnah merah dari daun jati dan daun pacar, warna kuning dari kunyit, warna hijau dari daun pandan, pohon mahoni untuk warna cokelat kemerahan, biji asam untuk warna cokelat tanah, dan batang pisang yang sudah membusuk untuk warna cokelat tua. Namun karena warna alami membutuhkan waktu yang lama untuk

meramunya, mudah luntur dan sudah mulai langka bahan bakunya sehingga pewarnaan secara alami mulai ditinggalkan. Memudarnya penggunaan bahan alamiah dalam proses pewarnaan juga dipengaruhi oleh maraknya kegiatan perdagangan zat pewarna sintetis yang terjadi sejak pada tahun 1900 sampai pada saat ini.

Berdasarkan corak kain tenun, nampak bahwa permasalahan kain tenun dipengaruhi oleh masalah perekonomian dan teknologi yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian corak. Sumber gagasan menjadi sasaran utama dalam penyesuaian corak kain Bugis. Sebelum tahun 1900 sumber gagasan pada corak bersumber dari mitos atau pengalaman budaya masyarakat pada saat itu. Sesudah tahun 1900 sumber gagasan berubah mengikuti perkembangan selera pasar. Permintaan konsumen akan jenis corak dan warna tertentu, mempengaruhi penciptaan corak dan warna kain tenun sejak tahun 1900 sampai saat sekarang ini.

### **Transformasi Peralatan dari Tradisional (Walida) ke Modern**

Penenun di Kabupaten Wajo dalam kegiatan produksinya menggunakan tiga macam alat tenun yaitu alat tenun gedogan, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), dan Alat tenun Mesin (ATM). Penggunaan alat tenun gedogan oleh masyarakat setempat dimulai sejak abad ke-13 atau sejak adanya kerajaan Wajo sampai pada saat ini. Alat tenun gedogan adalah alat tenun tradisional yang semua peralatannya digerakkan oleh tangan atau tenaga manusia. Alat tenun ini tersebar ke berbagai pelosok pedesaan dan biasanya digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga dan para gadis desa. Kain yang dihasilkan dari alat tenun gedogan ini

lebih banyak dalam bentuk sarung.

Model alat tenun gedogan yang digunakan di Wajo termasuk alat tenun berpenyangga belakang. Bentuknya mirip dengan alat tenun berkeliling disambungkan, walau benang lungsinya tidak bersambung. Model seperti itu belakangan hanya ditemukan di bagian tenggara Sulawesi Selatan, sepanjang teluk Bone, dan pemukiman orang Bajo di Kepulauan Sembilan. Sebelumnya, model tersebut juga digunakan pada berbagai lokasi di Sulawesi dan Flores. Penenun gedogan tersebar di berbagai desa yang ada di Kabupaten Wajo. Hampir semua wilayah Kecamatan di Wajo kita bisa menemui adanya penenun gedogan. Sampai tahun 2012 terdapat 5113 alat tenun gedongan.

Kegiatan pertenunan gedogan (*walida*) tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo dan umumnya memproduksi kain sarung sutera. Kegiatan tenun gedogan di masyarakat tersebut umumnya dilakukan oleh kalangan perempuan sebagai bagian tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan mendatangkan keuntungan ekonomis. Kegiatan tenun gedogan bagi masyarakat Wajo merupakan katup pengaman dalam menunjang ekonomi keluarga pada saat pendapatan suami sebagai petani atau nelayan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada tahun 1951, terjadi revolusi tenun jilid pertama dalam hal penggunaan alat tenun di kalangan masyarakat Bugis pada umumnya dan masyarakat Wajo pada khususnya. Hal ini ditandai dengan digunakannya Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dalam kegiatan pertenunan di Kabupaten Wajo. Wajo merupakan salah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang pertama kali menggunakan ATBM. Alat tenun Bukan Mesin (ATBM), masuk ke Wajo dibawa dua orang sahabat yaitu Akil

Amin dan Ibrahim Daeng Manrapi. Keduanya merupakan pedagang antar pulau yang sering bolak-balik Makassar - Surabaya. Keduanya membeli ATBM di wilayah Gresik - Jawa Timur, dan membawanya ke Wajo sekaligus membawa tenaga teknis dari Gresik yang akan menjalankan ATBM dan sekaligus mengajarkan masyarakat di Wajo menggunakan ATBM.

Penggunaan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kabupaten Wajo semakin berkembang sejak tahun 1965 melalui seorang tokoh perempuan yang juga seorang bangsawan Bugis bernama Datu Hj. Muddariyah Petta Balla'sari. Beliau mendatangkan ATBM tersebut dari Thailand sekaligus mendatangkan seseorang yang akan mengajarkan penggunaan alat tenun tersebut kepada masyarakat di Kabupaten Wajo. Berkat prakarsa Datu Hj. Muddariyah Petta Balla'sari (*Ranreng Tua Wajo*) inilah sehingga memacu ketekunan dan wawasan kreativitas masyarakat dan pengrajin tenun gedogan yang lainnya untuk mengembangkan kegiatan pertenunan di Kabupaten Wajo dengan mengadopsi ATBM tersebut (Armayani, dkk, 2009). Para gadis-gadis desa dipanggil ke rumah Petta Balla'sari untuk belajar menggunakan ATBM. Dengan semakin banyak gadis yang pintar menggunakan ATBM, maka semakin tersebarlah penggunaan ATBM dalam kegiatan pertenunan di masyarakat Wajo.

ATBM biasa juga disebut dengan alat tenun Model TIB (*Textile Inricthing Bandung*), karena lembaga ini yang pertama kali menciptakan alat tenun ini pada tahun 1912. Pada awalnya ATBM di Wajo hanya memproduksi kain sarung Samarinda yang berbentuk kotak-kotak. Sejak tahun 1980-an ATBM mulai memproduksi *balo mattettong* (corak tegak lurus), bahkan dalam perkembangan selanjutnya ATBM sudah mulai

memproduksi berbagai jenis kain yang lebih bervariasi seperti motif tekstur polos, selendang, perlengkapan pakaian, asesoris rumah, hotel, restoran, kantor, dan lain-lain. Kegiatan produksi penenun yang menggunakan ATBM dewasa ini lebih berdasarkan permintaan pasar atau selera konsumen. Penenun ATBM memproduksi kain sutera maupun kain non-sutera. Gambaran mengenai persebaran penggunaan ATBM, baik yang memproduksi kain tenun sutera maupun non sutera di Kabupaten Wajo terdapat 1914 alat tenun ATBM.

Kegiatan pertenenunan ATBM di Kabupaten Wajo lebih dominan berada di Kecamatan Tanasitolo dengan jumlah ATBM untuk sutera dan non-sutera sebanyak 1.012. Sekitar 75% dari jumlah ATBM tersebut dimiliki oleh kalangan pengusaha tenun di Wajo sedangkan sisanya dimiliki oleh penenun ATBM skala rumah tangga. Dominannya penggunaan ATBM di Kecamatan Tanasitolo tidak terlepas dari banyaknya kalangan pengusaha tenun yang berasal wilayah tersebut.

Pada awal kehadirannya, ATBM hanya digunakan untuk tenunan kain biasa bukan untuk sutera sehingga para penenun sutera masih menggunakan sistim gedogan untuk memproduksi sarung sutera Bugis. Keadaan ini memberi ruang kepada tenun gedogan masih dapat bertahan. Pada tahun 1980, seorang pengusaha sutera mengujicoba menenun sutera dengan menggunakan ATBM. Hasil uji coba ini ternyata berhasil sehingga sejak itu, ATBM sudah dapat digunakan untuk menenun sutera.

Produksi sutera mengalami peningkatan setelah penggunaan ATBM untuk menenun sutera. Sistem tenun gedogan yang masih tradisional menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Sedangkan pada sistem

ATBM walaupun belum menggunakan mesin sebagai pendukung pertenenan tersebut, namun sudah mulai mengarah pada pengelolaan yang semakin cepat. Umumnya penenun yang menggunakan ATBM mampu menghasilkan kain tenun 4 - 8 meter tiap hari.

Memasuki awal tahun 2004, terjadi revolusi tenun jilid kedua dalam kegiatan pertenenan di Wajo. Hal ini ditandai masuknya Alat Tenun Mesin (ATM) yang dibeli salah seorang pengusaha tenun asal Wajo yang bernama Haji Arifuddin dari seorang pengusaha tenun yang ada di Majalaya - Jawa Barat. Sejumlah besar ATM yang dibeli bapak Haji Arifuddin seharga kurang lebih 1 milyar. Sebagian besar ATM yang dimiliki oleh Hj. Arifuddin tersebut tetap dioperasikan di daerah Majalaya dan sebagian lainnya dibawa ke Kabupaten Wajo. Gejala masuknya ATM di wilayah Wajo, mirip dengan gejala masuknya ATBM, yaitu kalangan pengusaha tenun Wajo membawa peralatan tenun sekaligus membawa tenaga tekhnis dari Jawa yang akan menjalankan alat tenun tersebut sekaligus mengajarkan penduduk lokal cara-cara menggunakan ATM tersebut.

Penggunaan ketiga alat tenun tersebut tetap hidup berdampingan dalam satu kawasan, sehingga menjadi menarik proses transformasi yang dilakukan oleh penenun, karena modernisasi peralatan tenun tidak mematikan kegiatan tenun tradisional yang ada. Gejala ini berbeda dengan yang terjadi Inggris pada masa awal revolusi industri di mana kegiatan pertenenan modern mematikan kegiatan pertenenan tradisional.

## **SIMPULAN**

Keberadaan tradisi menenun di Wajo pada masa lalu sebagai *high*

*culture*, di mana awalnya diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan adat mengalami perubahan dengan diproduksi secara massal untuk kebutuhan pasar. Sebagai aktivitas budaya dan ekonomi, kegiatan menenun di Wajo telah mengalami proses transformasi yang cukup panjang sejak abad ke-13 sampai saat sekarang ini. Para penenun Wajo senantiasa melakukan inovasi produk untuk menyesuaikan perkembangan yang ada atau selera pasar. Keadaan ini didukung oleh kebudayaan tenun mereka yang memiliki daya lentur menghadapi berbagai periode waktu.

Proses transformasi corak mulai dari era corak vertikal dan horisontal (*balo mattetong dan makkalu*) (tahun 1400-1600), corak kotak-kotak/palekat (1600-1900) masyarakat setempat sudah mulai mengenal tenun dengan lebih baik sehingga garis-garis horizontal), yaitu babak corak bergambar (1900-sekarang), yang terjadi dalam kegiatan pertenenan di Wajo tidak serta menghilangkan corak sudah ada sebelumnya. Demikian pula dalam hal proses transformasi dalam penggunaan alat tenun yaitu mulai digunakannya alat tenun gedogan pada abad ke-13, penggunaan ATBM pada awal tahun 1950, serta penggunaan ATM pada tahun awal tahun 2004.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Makassar: Innawa.
- Arsip Nasional Republik Indonesia., 1982. *Lembaran Berita Sejarah Lisan. Nomor 9 Maret 1982*.
- Arsip Nasional Republik Indonesia., 1985. *Lembaran Berita Sejarah Lisan. Nomor 11 Maret 1985*.
- Armayani., Nuryamin., Mahaliha A. Gele., dan Ridwan A. Pamelleri. 2008. *Profil Persuteraan di Kabupaten Wajo*. Sengkang: Pemda Wajo.
- Badan Pusat Statistik, 2012. *Kabupaten Wajo Dalam Angka*. Sengkang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo.
- Dinas Perindustrian dan UKM Kabupaten Wajo, 2013. *Data Pertenenan Gedogan dan ATBM (sutera dan non sutera tiap Kecamatan)*. Sengkang: Dinas Perindustrian dan UKM Kabupaten Wajo.
- Chabot, H.Th. 1996. *Kinship Status and Gender in South Celebes*. Leiden: KITLV. Prees.
- Gootschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Indonesia: UI Press.
- Guba, Egon G. and Yvonna S. Lincoln. 2000. *Competing Paradigms in Qualitative Research*. in Denzin, N.K. & Yvonna.S. Lincoln (eds). 2000. *Handbook of Qualitative Research. (Second Edition)*, Thousand Oaks: Sage Publication. Inc.
- Fitria, Dwi. 2011. *Antara Kearifan Lokal dan Modernitas*. *Jurnal Nasional*. <http://nasional.jurnas.com/halaman/8/2011-09-11/181757>.
- Idris, Rabihatun., Hasnawi, Haris dan Suraidah, Hading. 2009. *Perpaduan Tenun Tradisional Bugis-Malaysia (Penelusuran Tenunan Tradisional Bugis-Malaysia yang Mencerminkan Hubungan Antar Bangsa)*. Laporan Hasil Penelitian Fundamental, Makassar: LPM-UNM (Tidak Dipublikasikan).
- Kahdar, Kahfiati. 2009. *Adaptasi Estetik Pada Corak Lippa Bugis*. Bandung: PPS - Institut Teknologi Bandung. Disertasi (Tidak Dipublikasikan).
- Kartiwa, Suwandi. 2007. *Ragam Kain Tradisional Indonesia: Tenun Ikat*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lewis, Oscar. 1988. *Kisah Lima Keluarga: Telaah-Telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maxwell, Robyn. 2003. *Textiles of Southeast Asia*. Revised Edition, Australia: Oxford University Press.
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Haberman, 1994. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

- Rosdakarya.
- Nawawi, Muhammad dan SP. Gustami, 2002. *Seni Kerajinan Tenun Sutera Tradisional Bugis Wajo Sulawesi Selatan Antara Tantangan dan Harapan*. Jurnal Sosiohumanika (15) 1: 1-14, Januari 2002. Yogyakarta: Fakultas Sastra - UGM.
- New Rotterdam Courant, tanggal 5 Oktober 1929.
- Oki, Akira. 1977. *Social Change in West Sumatran Village: 1908-1945*. Ph.D. Thesis. Canberra: Australian National University.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Terjemahan Abdurrahman Abu dkk. "The Bugis. Indonesia: Nalar.
- Reid, Anthony. 1974. *Indonesian National Revolution*. Hawthorn, Australia: Longmans.
- Ricklefs., M.C. 1981. *A History of Modern Indonesia*. Bloomington: Indiana University Press.
- Sahriah, M. 1993. *Tenunan Khas Sulawesi Selatan dan Tenggara*. Ujung Pandang: Bagian Proyek Pembinaan Permeseuman Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Proyek Pembinaan Permeseuman Sulawesi Tenggara.
- , 1992. *Tenunan Nusantara*. Ujung Pandang: Bagian Proyek Pembinaan Permeseuman Sulawesi Selatan.
- Sitorus, M.T. Felix. 1999. *Pembentukan Pengusaha Lokal di Indonesia: Pengusaha Tenun dalam Masyarakat Batak Toba*. Disertasi pada SPS-IPB. Bogor: Institut Pertanian Bogor (Tidak Dipublikasikan).
- Yukimatsu, Keiko. Chantachon, Songkoon, Pothisane, Souneth., Kobsiripha, Wissanu. 2008. *The Added Values of Local Silk Textile: Thai-Lao Matmii and Japanese Tumugi Kasuri*. SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia. Volume 23, Number 2, October 2008, pp. 234-251.